

Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan Dengan Menganut Prinsip Kehati-hatian Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia = The Implementation of Business Judgment Rule Principles in Credit Activities by Adhering to the Prudential Principle in the Case of Alleged Banking Crimes in Indonesia.

Br Ginting, Dewi Maya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20510383&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, *abuse (abnormal use) of power* dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (*internal control*). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai *immunity doctrine* bagi direksi untuk menangkis tuduhan *White Collar Crime* yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara *das sein* dengan *das solen*. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan *Prudential Principle* dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (*duty of care*) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas *immunity doctrine*.

In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how

is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in

Indonesia?</p><p>The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.</p><p>From the results of this study, it is

concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.</p>